

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN KEPULAUAN SEBAGAI KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Snataka Pribadi

Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-61 TA 2023

Email: drgsnataka@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.134>

Abstrak

Masyarakat pesisir dan kepulauan adalah kelompok masyarakat marginal (masyarakat dengan keterbatasan akses pada berbagai hal terkait perikehidupan) diantara masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemarginalan ini terbentuk akibat warisan kolonial Belanda yang menyadari potensi kejuangan yang tinggi didalam masyarakat bahari Nusantara di masa lampau. Kejuangan tinggi ini timbul karena pekerjaan di laut membutuhkan kekuatan, kebersamaan dan persatuan. Karena itu, ditengah keterbatasan, masyarakat pesisir dan kepulauan merupakan salah satu komponen pendukung dalam upaya pertahanan negara yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Demi menyiapkan mereka sebagai komponen pertahanan negara ini, harus disusun langkah strategis dengan diawali dengan pengentasan derajat kehidupan ketingkat lebih baik utamanya dalam hal perekonomian. Dengan peningkatan ekonomi, wawasan fikir mereka akan lebih terbuka sehingga harapan menjadikan 120 juta penduduk Indonesia yang mendiami wilayah pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung pertahanan negara dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Komponen Pendukung Pertahanan Negara, Marginal, Masyarakat Pesisir dan Kepulauan.

Abstract

Coastal and island communities are marginalized groups of people (people with limited access to various matters related to livelihoods) among Indonesian society in general. This marginality was formed as a result of the Dutch colonial heritage which realized the high potential for struggle within the maritime society of the Archipelago in the past. This high struggle arises because working at sea requires strength, togetherness and unity. Therefore, in the midst of these limitations, coastal and island communities are one of the supporting components in the national defense effort that adheres to the universal people's defense system. In order to prepare them as a component of national defense, strategic steps must be formulated starting with alleviating living standards to a better level, especially in terms of the economy. With an increase in the economy, their horizons of thought will be more open so that the hope of making the 120 million Indonesians living in coastal and island areas a supporting component of national defense can be realized.

Keywords: Supporting Components of National Defense, Marginal, Coastal and Island Communities.

PENDAHULUAN

Pertahanan negara memiliki sebuah tujuan berupa tetap tegaknya kedaulatan serta keutuhan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan amanah dari Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karena itu, segala upaya yang dilakukan terkait masalah pertahanan negara harus bertitik tolak, diimplementasi dan tujuannya sesuai dengan amanah UU.

Sistem pertahanan Indonesia disusun berdasarkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem pertahanan rakyat semesta (Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Dimana sistem ini menyerukan kepada seluruh elemen bangsa termasuk didalamnya seluruh sumber daya nasional untuk berkontribusi kepada pertahanan negara ketika dibutuhkan.

Berdasarkan pada sistem ini, pola pertahanan Indonesia di bagi menjadi 3 kelompok besar yang dikenal dengan istilah komponen pertahanan. Masing-masingnya adalah; Komponen Utama-terdiri dari satu kelompok. Kelompok ini merupakan alat negara profesional yang bekerja demi kesiapan negara menghadapi segala kemungkinan ancaman yang datang dari luar yang memiliki potensi memecah keutuhan dan kedaulatan yaitu Tentara

Nasional Indonesia (TNI); Komponen Cadangan-komponen ini bersumber pada mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran. Mereka adalah kelompok *stand by force* dalam istilah kemiliteran atau yang senantiasa siap dimobilisasi ketika negara membutuhkan tambahan kekuatan demi memperkuat komponen utama dengan turut terjun secara aktif pada kegiatan pertahanan ketika dibutuhkan; Dan komponen pendukung-merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kekuatan kedua komponen sebelumnya terdiri dari berbagai elemen serta sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Komponen pendukung terdiri dari seluruh sumber daya nasional diluar komponen utama dan komponen cadangan; termasuk didalam komponen pendukung adalah masyarakat pesisir dan kepulauan. Masyarakat yang berdiam di sepanjang 81.290 km garis pantai Indonesia (Lubis, 2009). Sebagai negara dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terluas dan terbesar di dunia, dengan hampir 75% wilayah berupa perairan jika dihitung sampai dengan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia-ZEEI (Pratama, 2020). Sebagai catatan, luas daratan Indonesia hanya sekitar 2,01 juta km² dengan total laut 5,8 juta km² (termasuk ZEEI).

Kondisi riil geografis ini menyebabkan masyarakat pesisir dan kepulauan

merupakan salah satu elemen vital bagi pertahanan negara. Akan tetapi, terkait keberadaannya, masyarakat pesisir dan kepulauan identik dengan masyarakat terbatas kemampuan terutama dari segi ekonomi (Rama, 2013). Mereka kita kenal sebagai masyarakat marginal dengan keterbatasan akses terhadap berbagai hal terkait perikehidupan.

Tertarik akan situasi ini, penulis mencoba menyajikan sebuah telaah tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam naskah ini bersifat deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait masalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung pertahanan negara kemudian menyusun hal yang urgen terkait masalah yang ada berdasarkan landasan teori untuk kemudian disusun rangkaian solusi yang sifatnya cepat dan tepat agar hasil yang diharapkan dapat segera terwujud berdasarkan regulasi dan aturan perundangan serta norma yang berlaku di NKRI.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk prosedur penelitian kualitatif Creswell (1994). Disain disusun

menggunakan paradigma *post-positivisme*. Paradigma *post-positivisme* ini dipilih karena pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung bela negara merupakan suatu "*observed facts*" yang muaranya adalah "*knowledge based on experience*", disini ditekankan bahwa sumber data yang diungkapkan berasal dari pengamatan literatur. Rangkaian data ini kemudian diperkuat pengalaman dan observasi penulis selaku perwira TNI-AL dalam interaksinya dengan masyarakat pesisir dan kepulauan selama penugasan sehingga menghasilkan suatu hal untuk ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah peralihan antara laut dan daratan. Batasannya secara teori ke arah darat adalah mencakup area yang terkena percikan air laut atau area pasang-surut dan ke arah laut berpatokan pada landasan kontinen. Untuk Indonesia ke arah darat adalah seluruh wilayah desa/kelurahan yang berbatasan dengan laut atau yang memiliki garis pantai sesuai Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Berdasarkan hal ini, kepulauan di sepanjang Nusantara termasuk ke dalam kategori daerah pesisir (utamanya pulau-pulau kecil dimana hampir

secara administrasi seluruh desa/kelurahan di pulau-pulau itu memiliki garis pantai).

Masyarakat pesisir dan kepulauan di Indonesia saat ini merupakan kelompok masyarakat dengan keterbatasan. Mereka, memiliki sarana minimalis untuk menunjang kehidupan apabila dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal yang membuat kadang mereka kerap disebut masyarakat marginal. Yakni masyarakat dengan keterbatasan akses.

Kelompok ini terbentuk di Indonesia karena kebijakan politis masa lampau yang secara sosiologis mengecilkan keberadaan mereka. Azasinya, kelompok marginal tidak terbentuk secara alamiah, melainkan hasil sebuah kebijakan politik jangka panjang (Bourdier,1986). Dalam kasus Indonesia, penyebabnya adalah Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka merubah budaya bahari Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berorientasi ke darat. Hal ini, terbawa beratus tahun hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Saat ini, nelayan tradisional yang merupakan profesi mayoritas masyarakat pesisir dan kepulauan hidup di bawah garis kemiskinan (F Muhammad, 2009). Hal penyebab utama karena nelayan tradisional Indonesia mayoritas merupakan buruh (bukan pemilik kapal atau perahu). Selanjutnya menurut Fadel

Muhammad, penghasilan yang didapat oleh buruh nelayan dan/atau nelayan kecil tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup. Akibatnya, ketika mereka melaut keluarga dirumah berpotensi terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan, ketika mereka kembali dari melaut, hasil upayanya akan langsung habis untuk membayar hutang yang sebelumnya dibuat. Menjadi sebuah lingkaran tanpa ujung ketika kemudian hutang berulang.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung pertahanan negara, kuncinya adalah meningkatkan dahulu taraf ekonomi mereka. Ketika ekonominya terjamin, wawasan fikirnya akan lebih mudah menerima ideologi atau pemikiran lain diluar pemikiran terkait pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Terkait hal ini, pemerintah telah menggariskan dalam Peraturan Presiden-Perpres 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Kertas Negara, 2022). Dimana pada lampirannya menegaskan terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Sebagai salah satu tujuan aksi, mengentaskan masyarakat pesisir dan kepulauan dari kemiskinan merupakan salah satu hal esensial dalam keppres ini. Aksi sendiri menjadi tanggung-jawab bersama 40 kementrian atau lembaga dan dilaporkan pada bulan ke-6, 9 dan 12 setiap tahunnya kepada Presiden.

Masyarakat pesisir jumlahnya saat ini lebih dari 120 juta orang. Hal ini disampaikan oleh Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan Dan Pesisir Seluruh Indonesia-Aspeksindo Andi Harun kepada Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin saat audiensi Aspeksindo di Kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro Nomor 2-Jakarta, Rabu tanggal 19 Januari 202 (Kemensekneg, 2022). Angka 120 juta disini meski perlu dilakukan pendataan riil dapat menjadi sebuah asumsi patokan jumlah. Karena diperoleh dari sumber yang terpercaya.

Angka ini merupakan sebuah potensi besar bagi negara dalam segala hal termasuk didalamnya aspek pertahanan. Akan tetapi, kondisi saat ini mayoritas masyarakat pesisir dan kepulauan hidup dibawah garis kemiskinan, angka yang seharusnya menjadi potensi pertahanan, dengan kemiskinan mereka menyebabkan potensi yang ada menjadi suatu beban bagi negara. Diperlukan upaya menyeluruh untuk mengangkat penghasilan mereka agar segera dientaskan dari kemiskinan sebelum kita dapat mengajak mereka untuk berbicara terkait aspek kejuangan dan masalah bela negara.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-UUD 1945 Pasal 30 ayat 1: *"Tiap-tiap warga negara*

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" ayat 2: *"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung"* (Kertas Negara, 1945).

Ayat 1 dan 2 Pasal 30 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi bagi segala upaya dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Secara jelas negara ini mengamanahkan hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk turut serta dalam kegiatan pertahanan dengan TNI sebagai komponen utamanya dalam suatu sistem pertahanan rakyat semesta.

Seperti disebutkan pada bagian awal tulisan. Sistem pertahanan rakyat semesta membagi komponen pertahanan dalam 3 kelompok-Utama, Cadangan dan Pendukung. Ketiganya, sesuai porsi masing-masing akan saling melengkapi ketika negara membutuhkan sebuah mobilisasi umum akibat adanya upaya pihak asing mengusik kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi ancaman ini kemungkinan terbesar muncul dari arah laut. Argumentasinya, untuk menguasai Indonesia atau suatu wilayah yang tergabung dalam wadah NKRI, pihak asing

pastinya menuju suatu titik (untuk Indonesia adalah pulau) yang atas kepentingan tertentu dianggap tepat untuk dikuasai. Moda transportasi utama yang dilakukan oleh mereka untuk penguasaan wilayah suatu negara kepulauan adalah kapal. Dan daerah yang dituju adalah pulau.

Negara atau pihak yang berupaya mengusik kedaulatan dan keutuhan NKRI akan menunjukan arah serangan kepada pulau milik NKRI. Dengan tujuan agresi adalah pulau, artinya garis pertahanan terdepan di darat adalah daerah pesisir. Terkait hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan amat menyadarinya. Wilayah pesisir Indonesia harus kuat. Hal ini merupakan konsep yang tidak bisa ditawar oleh siapapun.

120 juta penduduk Indonesia di daerah pesisir dan kepulauan memiliki potensi besar untuk turut andil pada saat mobilisasi. Karenanya semangat bela negara harus ditumbuh kembang pada masyarakat daerah pesisir dan kepulauan. Akan tetapi, kondisi bagian terbesar dari 120 juta penduduk tadi hidup dibawah garis kemiskinan sehingga potensi ini tidak dapat dibentuk sebagai komponen pendukung strategis karena mereka lebih terfokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sangat riskan ketika kekuatan asing yang datang menawarkan upeti atau janji-janji manis atas diri mereka.

Masyarakat miskin memiliki sebuah pola pikir yang sangat pragmatis. Artinya, bagi mereka kemiskinan telah menjadi bagian kehidupan sehingga dianggap sebagai suatu kewajaran. Hal ini membentuk stigma pasrah dalam menatap masa depan dan menjadikan sebuah simpulan tentang kemiskinan adalah bagian kehidupan (Nahda, 2022). Kondisi membuat kecil kemungkinan bagi mereka untuk berfikir, melakukan kegiatan atau aktifitas lain diluar aktifitas pemenuhan kebutuhan pokok hidup. Jika ingin mengambil manfaat keberadaan mereka bagi kepentingan negara, selain melalui pendidikan kebangsaan sejak usia dini, mereka harus dikenyangkan atau dalam bahasa lainnya, harus disejahterakan terlebih dahulu.

Ketika terjadi mobilisasi umum, para pemuda dan pria dewasa dari daerah pesisir dan kepulauan harus bergerak dengan tidak dibebani kondisi perekonomian keluarga di belakang mereka. Hal ini secara esensial sangat penting dilakukan karena keluarga secara naluriah adalah central pemikiran seorang manusia, siapa dan bagaimanapun kedudukannya dalam struktur masyarakat. Berlandas pada hal ini, salah satu langkah awal untuk menyiapkan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung adalah menaikan standar perekonomian mereka.

Hal ini bukanlah sebuah pekerjaan rumah yang ringan. Pemerintah menyadari situasi ini sehingga mencetus terbitnya Peraturan Presiden-Perpres nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Kertas Negara, 2022). Dalam perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, sebanyak 40 kementerian dan lembaga memiliki kewajiban melakukan aksi terkait kebijakan kelautan yang digariskan. Dan presiden menegaskan bahwa mengentaskan masyarakat pesisir dan kepulauan dari kemiskinan merupakan bagian fundamental dari peraturan ini. Disini dapat kita pahami betapa presiden memiliki visi serta pemikiran yang general dalam melihat segala permasalahan yang ada didalam struktur masyarakat Indonesia secara umum.

Kegiatan aksi yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada presiden dalam 3 kurun waktu yang singkat pada pertengahan hingga akhir tahun. Artinya, presiden menginginkan sebuah gerakan aksi bersifat masif yang dicanang dan dilaksanakan secara cepat, dievaluasi pada pertengahan kegiatan agar dapat dieliminir berbagai faktor penghambat sehingga setiap akhir tahun, apa yang dicanangkan diawal dapat dilihat hasilnya dan dapat dirasakan manfaatnya.

Pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir dan kepulauan adalah salah satu prasyarat awal mutlak dilakukan negara sebelum membentuk mereka sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Untuk itu, perlu disusun sebuah strategi bersifat makro dan mikro atas situasi ini yang dapat diimplementasi dengan memberi manfaat yang bersifat segera. Mengapa demikian? Ketika kita berbicara terkait masyarakat miskin, maka hal utama adalah, 'saya dapat apa?' terkait program disodorkan.

Menurut Teguh (2004) langkah-langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah; cipta suatu kondisi dimana masyarakat yang akan dientaskan dapat berkembang; meningkatkan kemampuan lewat sokongan dana, latihan, pemenuhan sarana prasarana dasar hingga sosial; dan perlindungan struktur sosialnya.

Bagi masyarakat pesisir dan kepulauan, ketiga strategi ini merupakan hal fundamental untuk mereka demi menaikan derajat ekonomi. Dan harus diingat oleh seluruh pemangku kebijakan strategis, bahwa pola pikir mereka rata-rata pragmatis. Sebuah kebijakan beresiko apabila mereka diberi penawaran peningkatan kesejahteraan atau bahkan mungkin alih

profesi tanpa ada jaminan terkait masalah ekonomi keluarga saat proses peningkatan dan/atau alih profesi berlangsung (Jika ada peluang alih profesi).

Untuk itu, perlu dibedah faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan taraf kehidupan sebagai batu pijakan untuk mengentaskan mereka dari garis kemiskinan. Secara agris besar, faktor penghambat untuk pengembangan taraf hidup masyarakat pesisir dan kepulauan antara lain:

- 1) Minimnya penguasaan teknologi kebaharian terkini.
- 2) Tingkat pendidikan yang rata-rata tertinggi hanya ditingkat bangku sekolah menengah.
- 3) Ketidakmampuan menolak harga hasil tangkapan yang diberikan pengepul.
- 4) Tingginya biaya operasional (biaya operasional terbesar adalah bahan bakar minyak-BBM).
- 5) Faktor musim dan cuaca di laut.

Dengan faktor pendukung untuk pengembangan kesejahteraan antara lain:

- 1) Potensi sumber daya sektor perikanan laut yang melimpah di seluruh wilayah NKRI.
- 2) Etos kerja yang tinggi yang merupakan ciri alami dari mereka yang hidup dan bekerja di laut.

3) Tingginya minat masyarakat Indonesia dan dunia secara umum pada konsumsi ikan laut hasil tangkapan.

4) Kualitas perairan Indonesia dengan suhu serta iklim relatif stabil disepanjang tahun (kecuali pada bulan tertentu-tidak lebih dari 3 bulan setiap tahunnya).

5) Jika dimungkinkan, peluang pemberian kredit bagi usaha perikanan.

Sepuluh faktor tadi menjadi pegangan dalam aksi peningkatan taraf perekonomian masyarakat pesisir dan kepulauan. Dan hal yang mungkin dalam waktu singkat dilakukan untuk mengatasi masalah sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan:

- 1) Interfensi pasar.
- 2) Sosialisasi kredit agar nelayan memiliki keinginan beralih dari buruh menjadi pemilik.
- 3) Deregulasi harga dan ongkos produksi (misalnya BBM) untuk nelayan tradisional.
- 4) Pengenalan teknologi terbaru.
- 5) Diversifikasi pengolahan ikan hasil tangkapan.
- 6) Subsidi.

6 langkah strategis ini disusun oleh penulis berdasarkan skala prioritas terkait masalah fundamental nelayan tradisional yakni ekonomi. Perlu dipahami bersama, nelayan yang rata-rata buruh, hanya memiliki upah 35 % dari seluruh hasil

tangkapan. Angka ini masih harus dibagi antar mereka sesuai dengan posisi masing-masing di kapal (Kaha, 2022). Artinya langkah awal yang dilakukan adalah intervensi pasar.

Intervensi pasar membuat harga tidak semata ditentukan berdasar keinginan pengepul. Intervensi pasar membuat nelayan dapat mengukur atau minimal mengira berapa besar nominal jasa yang diterima ketika melepas ikan hasil tangkapan di laut pada pasar. Dan intervensi pasar sangat mungkin dilakukan karena perangkat pemerintahan ada hingga level terdekat dengan masyarakat pesisir.

Sosialisasi kredit, ketika sebuah keluarga memiliki kelebihan akibat bertambahnya penghasilan, disini masuk peluang kedua pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mengapa? Karena secara psikologis, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia akan memiliki pola pikir untuk berkembang.

Deregulasi harga dan ongkos operasional. Hal ini sesuatu yang mutlak dapat ditetapkan oleh pemerintah selaku pemilik regulasi. BBM adalah hal utama yang sangat diperhitungkan nelayan. Kekuatan pemerintah sangat tinggi terkait masalah ini. Salah satu faktor penyebab adalah pengelolaan tunggal distribusi dan penjualan bahan bakar oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengenalan teknologi terkini dan terbaru kepada komunitas masyarakat nelayan, termasuk didalamnya teknologi satelit pada titik penangkapan ikan yang kerap menjadi *blind-spot* komunikasi. Teknologi satelit dalam perkembangannya saat ini membuat nelayan dapat memahami berbagai hal terkait masalah geografis di laut termasuk didalamnya masalah iklim dan cuaca. Dengannya, proses melaut menjadi efisien dan efektif.

Langkah lanjutan adalah diversifikasi pengolahan ikan hasil tangkapan. Disini, pemerintah melakukan upaya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir dan kepulauan. Hasil tangkapan yang dikelola akan meningkatkan harga jual.

Subsidi, sesuai dengan temanya, subsidi disini berupa dukungan dana kepada pelaku usaha perikanan, bukan semata pemberian dana kepada masyarakat miskin.

Ketika taraf kehidupan sudah membaik, secara beriringan pendidikan bela negara dapat mulai kembali ditumbuhkan pada masyarakat pesisir dan kepulauan. **Kembali ditumbuhkan adalah kata** kunci disini karena azasnya pendidikan bela negara sebagai elemen fundamental menyiapkan masyarakat sebagai komponen pendukung telah ditanamkan dalam sistem pendidikan Nasional. Contohnya adalah Upacara pengibaran dan penurunan bendera setiap pekan yang dilaksanakan di

sekolah sampai dengan kegiatan ekstra kepramukaan, penuh dengan muatan bela negara.

Menumbuhkan kembali kesadaran bela negara sendiri oleh pemerintah diatur dalam sebuah Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 tahun 2018; yang memberi tanggung jawab kepada segenap kementerian, lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk melaksanakannya dengan sistematis, terstruktur, standar dan masif.

Ketika semangat bela negara telah tumbuh kembali di dalam jatidiri masyarakat pesisir dan kepulauan, mereka telah siap diberdayakan sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

PENUTUP

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan sebagai komponen pendukung pertahanan negara membutuhkan strategi bersifat *komprehensif*. Hal ini disebabkan karena taraf kehidupan mereka masih rendah dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hal ini harus terus menjadi salah satu konsentrasi pemerintah agar kekuatan pertahanan negara dapat terus ditingkatkan dengan masyarakat pesisir dan kepulauan yang terbedaya dalam bidang pertahanan negara.

REFERENSI

Bourdieu, P. 1986. In Other Word, Essays Towards a Reflexive Sociology. Cambridge, Polity Press.

Departemen Kelautan RI (2002) data prosentase wilayah laut dan darat. Blog KKP, diakses 27 Februari 2023.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2018 tentang aksi bela negara. Kertas negara, diakses 1 Maret 2023.

Kaha,C. 2022. Kisah Nelayan Rote di Perbatasan Negeri. Antara Bengkulu, di akses 21 Februari 2023.

Kementerian Sekretariat Negara, (2022). Tingkatkan Ekonomi Masyarakat di Daerah Kepulauan dan Pesisir, Wapres Minta Peran Aktif Aspek-sindo. Blog Kementerian Sekretariat Negara, diakses 1 Maret 2023.

Lubis, S (2009). Indonesia negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia. Blog Kementerian ESDM, diakses 20 Februari 2023.

Muhammad, F (2009). Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah. Jakarta: Gramedia.

Nahdah, S.R (2022). Analisis Kemiskinan dari Pola Pikir Individu. BlogMijil, diakses 1 Maret 2023.

Peraturan Presiden-Perpres 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Pratama, O (2020) Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Blog Kementrian KKP, diakses 20 Februari 2020.

Rama, (2013). Karakteristik Masyarakat Pesisir. Blog-Bangrama, di akses 21 Februari 2023.

Teguh, A.S. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta. Gaya Media.

UU No 3 Tahun 2002 pertahanan negara. Halaman negara.

UUD 1945 tahun 1945. Halaman negara.